

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi fatwa DSN-MUI pada praktik akad murabahah bil wakalah di KSPPS BTM Mulia Babat, Kabupaten Lamongan. Dua fatwa utama yang menjadi landasan hukum dalam praktik pembiayaan ini adalah Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, yang mengatur jual beli dengan margin keuntungan, dan Fatwa DSN-MUI No. 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Wakalah, yang mengatur pelimpahan kuasa dalam transaksi. Kombinasi dua akad ini memungkinkan koperasi syariah memberikan pembiayaan tanpa harus secara langsung membeli barang yang dibutuhkan nasabah, namun tetap dalam koridor prinsip-prinsip syariah.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi. Informan yang dilibatkan dalam penelitian terdiri dari manajer koperasi, staf pembiayaan, dewan pengawas syariah, serta beberapa nasabah penerima pembiayaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi akad murabahah bil wakalah di KSPPS BTM Mulia telah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Prosedur pembiayaan dimulai dari pengajuan permohonan, analisis kelayakan usaha atau kebutuhan, akad pembiayaan, pelimpahan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang, hingga penyerahan bukti pembelian sebagai bentuk pertanggungjawaban. Fatwa DSN-MUI dijadikan sebagai rujukan utama dalam penyusunan SOP koperasi, dan peran Dewan Pengawas Syariah cukup aktif dalam melakukan pengawasan rutin. Kendala yang muncul bersifat teknis administratif, seperti keterlambatan penyerahan nota pembelian atau rendahnya pemahaman awal nasabah mengenai struktur akad. Namun secara keseluruhan, hal ini tidak mengganggu substansi sharia compliance dari akad tersebut, karena aspek rukun dan syarat tetap terpenuhi.

Kata Kunci: BTM Mulia, Fatwa DSN-MUI, Implementasi, Murabahah Bil Wakalah

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of DSN-MUI fatwas in the practice of murabahah bil wakalah contracts at KSPPS BTM Mulia Babat, Lamongan Regency. Two main fatwas serve as the legal foundation for this financing practice: DSN-MUI Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 on Murabahah, which regulates trade with a profit margin, and DSN-MUI Fatwa No. 13/DSN-MUI/IX/2000 on Wakalah, which governs the delegation of authority in transactions. The combination of these two contracts allows Islamic cooperatives to provide financing without directly purchasing the goods needed by the customer, while still adhering to sharia principles.

This research employs a descriptive qualitative method, with data collection techniques including in-depth interviews, field observations, and documentation. Informants in this study consist of the cooperative manager, financing staff, sharia supervisory board members, and several financing recipients.

The results show that the implementation of the murabahah bil wakalah contract at KSPPS BTM Mulia has been conducted in accordance with sharia principles. The financing procedure begins with a financing application, followed by feasibility analysis of the business or need, contract signing, delegation of authority to the customer to purchase the goods, and submission of the purchase receipt as a form of accountability. DSN-MUI fatwas serve as the main reference in drafting the cooperative's SOP, and the Sharia Supervisory Board plays an active role in conducting regular oversight. The challenges encountered are mostly technical and administrative in nature, such as delays in submitting purchase receipts or customers' limited initial understanding of the contract structure. However, these do not compromise the substance of sharia compliance, as all essential elements and conditions of the contract are fulfilled.

Keywords: *BTM Mulia, DSN-MUI Fatwa, Implementation, Murabahah Bil Wakalah*